



Kontestasi Elit dan Marginalisasi Penduduk Lokal di Lokasi Pertambangan Batubara Kutai Kartanegara

Oleh

Nurhadi Yuwana, Heru Nugroho, Irwan Abdullah¹

Abstrak

Konstitusi Indonesia menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya berbeda, pengelolaan kekayaan alam, khususnya barang tambang seperti mineral dan batubara tidaklah semudah yang dibayangkan dalam konsep teoritis, banyak kepentingan di belakangnya. Alih-alih memikirkan kepentingan rakyat, pemerintah justru membiarkan pengelolaan itu kepada investor asing. Kontestasi politik terjadi tidak hanya antara negara dengan korporasi tapi juga dengan warga lokal. Artikel ini mencoba menjelaskan fenomena kontestasi dan marginalisasi yang terjadi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kata Kunci : kontestasi, kapitalisme, marginalisasi

Abstract

Indonesian constitution explain that earth, water and natural resources are belongs to state and used for the prosperity of Indonesian people. But the fact is different, the management of natural resources especially mining such as mineral and coal is not as easy as what the theoretical concept told, lots of interest behind that. Rather than thinking about people's prosperity, government let the foreign corporations to controls the mining. Political contestation happens not just between state and corporation but also the local people. This article wants to explain the phenomena of contestation and marginalization that happened in Kutai Kartanegara, East Kalimantan.

Keywords: contestation, capitalism, marginalization.

A. Latar Belakang

Konstitusi mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi itu sesuai dengan prinsip sosialisme demokrasi yang membuka peluang bagi

intervensi negara dalam pengelolaan kekayaan alam, tetapi harus untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kekayaan alam harus bersifat populis dengan tekanan pada distribusi hasil tambang bagi pemegang kedaulatan, yaitu rakyat. Akan tetapi pada

¹ Nurhadi Yuwana adalah mahasiswa S3 di Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Heru Nugroho adalah Guru Besar Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada. Ketua Prodi Pascasarjana Kajian Budaya dan Media UGM serta Ketua Jurusan Sosiologi, Fisipol UGM. Irwan Abdullah adalah Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya, UGM. Pengajar pada Jurusan Antropologi, UGM

kenyataannya, pengelolaan kekayaan alam, khususnya barang tambang seperti mineral dan batubara tidaklah semudah yang dibayangkan, karena banyak kepentingan bermain di belakangnya. Alih-alih memikirkan kepentingan rakyat, pemerintah justru membiarkan pengelolaan itu kepada investor asing dengan pertimbangan lebih cepat menambah penerimaan negara. Akibatnya dalam banyak kasus, justru di daerah di mana memiliki potensi pertambangan yang besar, tetapi rakyat di sekitarnya tetap saja miskin. Lebih jauh lagi, ketika pengelolaan diserahkan pada pihak asing, maka meskipun eksploitasi sumber daya alam meningkat pesat namun tetap diikuti pertumbuhan manufaktur yang rendah

Pemerintah sendiri sebenarnya sejak dulu telah menyadari potensi kekayaan sumber daya alam di Indonesia, terutama dari sektor pertambangan. Melimpahnya kekayaan sumber daya alam juga sekaligus menyadarkan bahwa akan menjadi sumber konflik baik secara internal maupun eksternal. Dimanapun kekayaan sumber daya alam di muka bumi ini akan menjadi pusat perhatian dan mengundang para kapitalisme global. Bahkan kepentingan untuk mengeksplorasi sumber-sumber kekayaan alam inilah yang terbukti menjadi faktor determinan dinamika ekonomi, politik dan pertahanan. Berbagai perang yang melibatkan secara masif dari berbagai bangsa di dunia selama ini, juga tidak lepas dari perebutan sumber daya alam. Konflik internasional kontemporer, terutama juga dipicu oleh perebutan energi minyak sehingga kawasan Timur Tengah misalnya, akan senantiasa terus menjadi daerah konflik yang berkepanjangan seiring dengan tingginya nilai energi minyak.

Kehadiran pihak eksternal, yaitu kaum kapitalisme global mau tidak mau harus berurusan dengan negara yang memegang kewenangan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu negara melalui pemerintah mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam ini demi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat banyak. Akan tetapi dalam praksis tidak semudah yang diformulasikan seperti yang tercantum dalam berbagai peraturan legalistik. Di samping itu, sejumlah produk perundangan, prosesnya juga diwarnai oleh hubungan yang dominatif, karena bagaimanapun peraturan adalah produk politik sehingga tidak lepas dari konteks politik kelahirannya. Sebagai ilustrasi misalnya, ketika rezim Orde Baru berkuasa maka melahirkan sejumlah regulasi yang nuansanya sangat menguntungkan kekuatan kapitalisme global, karena dalam prosesnya memang mendapat tekanan dari kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat. PP No 20/1994 tentang penanaman modal asing, isinya mempersilahkan investor asing dengan leluasa mengeksplorasi dan bahkan mengeksploitasi sektor pertambangan. Demikian pula pada era reformasi, seperti UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal yang menggelar karpet merah buat investasi asing karena tidak lagi pembedaan dengan investasi dalam negeri, bagaikan komprador asing yang kian membat nasionalisme ekonomi yang sebenarnya ditopang dalam UUD 1945.

Khusus dalam peraturan sektor Mineral dan Batubara, telah diundangkan UU No 4/2009 yang mengamanatkan agar pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara harus berasaskan manfaat, keadilan, dan keseimbangan serta berpihak pada kepentingan bangsa. Paling tidak ada enam isu

strategis harus dipatuhi: luas wilayah kerja pertambangan, perpanjangan kontrak, penerimaan negras, kewajiban divestasi, kewajiban pengolahan dan perumahan, kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Akan tetapi pada kenyataannya dalam praktik banyak kejadian yang menyimpang dari amanat undang-undang tersebut.

Dalam kasus tambang batubara juga tidak jauh berbeda, Indonesia memiliki cadangan sekitar 28 miliar ton, tetapi anehnya membebaskan ekspor dan perizinan tambangnya yang sangat mudah didapat dari pemimpin daerah tanpa kontrol memadai dari pemerintah pusat. Akibatnya eksportir batubara menjadi raja-raja baru yang sangat kaya raya, dan investor asing menjamur karena kemudahan perizinan. Jadi pengelolaan batubara tidak dilakukan oleh pemerintah, tetapi lebih banyak diserahkan pada pihak swasta atau investor, terutama pihak asing. Investasi asing terus meningkat sebagaimana ditunjukkan pada realisasi penanaman modal asing yang meningkat rata-rata 185 persen pertahun. Melalui kebijakan yang mengundang investor asing itu berbagai mineral, batubara, hingga minyak dan gas di perut bumi negeri ini dikeruk serta sebagian besar dijual ke luar negeri. Batubara misalnya, hanya 23 persen produksinya dikonsumsi domestik. Semua itu dilakukan karena pemerintah ingin mendapatkan pemasukan negara secara lebih mudah dan cepat. Memang, dibandingkan dengan sektor lain, pemasukan devisa dari ekspor mineral, batubara, dan migas adalah paling besar. Seperempat hingga sepertiga total penerimaan negara berasal dari usaha pertambangan. Aliran uang ke kas negara dari kegiatan pertambangan secara umum bisa melalui dua pos, yakni pos penerimaan pajak dan pos

penerimaan bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkait dengan pertambangan selama ini menunjukkan kecenderungan meningkat. PNBP dari migas meningkat sekitar 15 persen per tahun selama 2005 hingga 2010. Sementara itu, pertumbuhan PNBP sektor pertambangan, termasuk batubara, meningkat rata-rata 41,5 persen per tahun. Akan tetapi, maraknya sektor pertambangan dan semakin meningkatnya pendapatan negara atas eksploitasi barang tambang tersebut tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan rakyat. Meskipun prestasi ekspor barang tambang terbilang baik dan bisa meningkatkan penerimaan negara, soal perhitungan bagi hasil yang berkeadilan, manfaatnya bagi perbaikan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan masih jauh dari harapan. Berbagai kasus di Kalimantan Timur misalnya, para elit politik dan investor sangat menikmati hasil penambangan batubara, tetapi rakyat pada umumnya masih sengsara. Belum lagi kerugian sosial budaya yang ditimbulkannya. Pada kenyataannya kehadiran para penambang batubara oleh perusahaan swasta menimbulkan dampak sosial budaya yang sangat serius. Hilangnya modal sosial seperti nilai gotong royong, solidaritas, toleransi, dan kebersamaan di masyarakat sekitar pertambangan adalah sederet persoalan sosial budaya yang disebabkan oleh eksploitasi tambang batubara.

Demikian pula yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur yang merupakan wilayah dengan kandungan batubara terbesar di Indo pula dengan sebutan emas hitam ini berlangsung secara besar-besaran. Berbagai investor berdatangan ke wilayah ini baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari tambang

batubara. Didukung oleh kebijakan pemerintah daerah, eksploitasi emas hitam semakin menjadi-jadi, sehingga menimbulkan kerusakan ekologi cukup signifikan. Maraknya penambangan batubara dapat dilihat dari banyaknya kapal-kapal pengangkut batubara atau yang populer disebut tongkang. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, setiap hari lebih dari 10 kapal tongkang lalulalang di sungai Mahakam mengangkut batubara untuk diekspor. Satu kapal tongkang berkapasitas rata-rata 8 ribu ton batubara, dengan nilai antara 6-9 milyar rupiah. Jika pada dekade tujuh puluhan hingga sembilan puluhan, sungai Mahakam ramai dengan kapal-kapal yang mengangkut kayu dari hutan tropis Kalimantan, sekarang lebih banyak didominasi komoditas barang tambang, khususnya batubara. Memang masih ada perdagangan kayu, tetapi volumenya jauh menurun dibandingkan era Orde Baru. Sekarang berganti batubara yang menjadi komoditas strategis dan menjadi faktor determinan terhadap denyut perekonomian Kalimantan Timur. Dengan deposit sekitar 8 milyar ton batubara, maka tidak mengherankan jika daerah ini sekarang bergantung pada komoditas batubara. Oleh karena itu batubara berada dalam posisi sentral dan menentukan terhadap berbagai sektor lainnya, terutama sektor perdagangan dan industri.

Kaum kapitalis di Kutai Kartanegara telah memiliki perusahaan yang bergerak dalam pertambangan batubara antara lain CV Arya Duta, CV Benua Bara Lestari, CV Binamitra Sumberarta, CV Firman Bersaudara, Gerbang Petani Mandiri, Kaltim Batu Manunggal, Komunitas Bangun Bersama, Mery Jaya, Perdana Maju Utama, Permata Hitam Indah, Rindu Alam, Sejahtera, Tahta Pokmas, Tunas Jaya, Mega Prima Persada, dan PT Bukit Berdiri Enterprise.

Kapasitas produksi dari perusahaan batubara tersebut mencapai 3.158 990 355 ton. Dari sejumlah perusahaan tersebut, sekitar 60 persen merupakan perusahaan asing sehingga terkait dengan kapitalisme global.

Kabupaten Kukar benar-benar menjadi tempat hunian dan sekaligus arena pertarungan para aktor yang memburu 'emas hitam'. Atmosfir kota Tenggarong pada khususnya, dan Kalimantan Timur pada umumnya penuh dengan wacana di seputar isu batubara. Barang milik alam ini telah menjadi teks dan praktik kebudayaan yang sarat dengan nuansa politik. Batubara tidak lagi bermakna sebagai benda mati yang berfungsi sebagai salah satu sumber energi, tetapi telah berfungsi menjadi penentu dalam memaknai hidup. Dengan batubara warga Kutai Kartanegara mengkonstruksi identitasnya secara dinamik yang termanifestasi pada gaya hidupnya sehari-hari.

Akan tetapi tidak jauh berbeda dengan daerah lain, maraknya pertambangan batubara di Kaltim tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan penduduk setempat. Penduduk di sekitar lokasi pertambangan kurang menikmati hasil emas hitam tersebut, hasilnya lebih banyak dinikmati oleh para investor dan jajaran pejabat daerah. Bahkan masyarakat di sekitar pertambangan semakin termarginalisasikan baik secara sosial maupun kultural. Semangat kebersamaan yangnesia. Dalam duabelas tahun terakhir eksploitasi batubara atau yang dikenal dahulu menjadi modal sosial bagi tatanan kehidupan warga secara harmonis, kini semakin memudar karena terkikis oleh arus kapitalisasi yang kian deras. Oleh karena itu studi ini akan melihat bagaimana kondisi warga di seputar lokasi pertambangan dari perspektif kajian budaya.

Sejumlah pertanyaan diajukan dalam studi ini antara lain: siapa aktor dalam berebut batubara dan bagaimana proses tarik-menarik kepentingannya?; bagaimana ideologi kapitalis global beroperasi dalam struktur kesadaran lokal dan menghancurkan nilai lokal?; dan bagaimana perlawanan warga di seputar lokasi pertambangan terhadap maraknya pertambangan batubara?

B. Kajian Teoretik.

Sebagai usaha untuk menjelaskan berbagai fenomena di seputar marginalisasi warga di sekitar lokasi pertambangan maka peneliti menggunakan teori globalisasi neo-Marxian dan teori modernisasi mulai dari Wallerstein hingga Anthony Giddens. Sementara itu tidak menutup kemungkinan akan menggunakan teori lain yang dipandang relevan dengan isu marginalisasi penduduk lokal.

1. Teori Globalisasi

Holm dan Sorensen memahami globalisasi sebagai semakin meningkatnya intensitas hubungan lintas batas negara baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Holton, 1998). Wallerstein memandang globalisasi tidak lebih dari wujud kejayaan ekonomi kapitalis dunia yang diterapkan oleh logika akumulasi kapital (Holton, 1998). Jin-Young Chung mendefinisikan globalisasi sebagai terintegrasinya dunia melalui peningkatan arus kapital, hasil-hasil produksi, jasa, ide, dan manusia yang lintas batas negara. Proses ini merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang revolusioner, liberalisasi perdagangan, dan keuangan di negara-negara besar

(Young Rae Kim dkk., 2002). Suatu proses meningkatnya keterkaitan antar masyarakat sehingga satu peristiwa terjadi di wilayah tertentu semakin lama akan kian berpengaruh terhadap manusia dan masyarakat yang hidup di bagian lain di muka bumi (Baylis dan Smith, 1997).

Sebuah teori globalisasi yang banyak dibicarakan dalam forum akademik secara meluas, antara lain teori sistem-dunia dari Immanuel Wallerstein. Teori ini merupakan teori tentang sejarah, dan sejarah yang diteorisasikannya adalah sejarah kapitalisme global. Karya besar Wallerstein terdiri dari tiga volume berjudul *The Modern World System* diawali abad awal keenambelas yang panjang, periode lepas landas ekonomi dunia kapitalis. Inti dari sistem dunia pada periode awal kapitalis yang terjadi di Prancis dan sekitarnya yang membentang di tepian sungai Rhine, Inggris, dan juga kota-kota Italia utara berubah ke arah industri manufaktur sambil terus mengandalkan pada daerah-daerah periferi untuk mendapatkan produk-produk pertanian dan bahan-bahan baku lainnya. Didukung oleh kekuatan dan kekuasaan negara-negara yang semakin mapan, kelas-kelas kapitalis di pusat (center) membentuk suatu siklus superioritas ekonomi dan militer yang saling mendukung. Industrialisasi negara-negara inti pada abad kedelapan belas dan abad kesembilan belas meningkatkan keunggulan relatif negara-negara pusat itu, yang melahirkan satu fase kolonisasi intensif dalam sejarah dunia yang tampaknya membawa seluruh bumi ini ke dalam ekonomi dunia kapitalis dibawah kepemimpinan imperium-imperium yang kekuasaannya membentang hingga ke berbagai belahan bumi dan berpusat di tangan kekuatan-kekuatan inti yang saling bersaing (Boli dan Lechner, 2009: 558).

Jadi, dalam pengertian yang lebih abstrak, teori sistem-dunia memahami ekonomi dunia ini sebagai terdiri dari tiga zona: inti (core), periferi, dan semi-periferi. Inti adalah zona yang memimpin, yang bercirikan pasar-pasar yang relatif bebas untuk memperdagangkan tenaga kerja, tanah, dan kapital; teknologi maju, tenaga kerja terampil dan dengan demikian, produktivitas tenaga kerja yang tinggi; kapital dalam jumlah yang besar dan akumulasi kapital berlangsung terus-menerus; keunggulan-keunggulan yang mengikutinya dalam bentuk sumber-sumber daya dan kekuatan koersif yang memungkinkannya mendominasi ekonomi dunia. Periferi, sangat tunduk kepada dan dieksploitasi oleh negara-negara inti, pada awalnya bercirikan bentuk-bentuk tenaga kerja paksa (penghambatan, perbudakan, status kontrak, dan semacamnya), pasar-pasar tanah dan kapital yang serba terbatas, rendahnya tingkat teknologi dan keterampilan buruh, rendahnya produktivitas dan terbatasnya akumulasi kapital. Negara-negara semi-periferi menduduki satu zona "antara" dengan tingkat perkembangan yang sedang, dieksploitasi oleh negara-negara inti atau pusat tetapi mengeksploitasi bagian-bagian tertentu wilayah periferi. Dengan demikian semi-periferi memediasi ketegangan-ketegangan antara inti dan periferi, berkontribusi bagi stabilitas keseluruhan sistem dunia sekaligus merupakan satu ancaman tersendiri bagi negara-negara inti.

Mengingat teori ini berlandaskan pada analisis Marxian dan penekannya pada ekonomi, teori sistem-dunia mengedepankan dua isu yang saling berkaitan: eksploitasi dan ketidaksetaraan. Inti mengeksploitasi yang bukan negara inti, kapital mengeksploitasi tenaga buruh. Eksploitasi

meningkatkan akumulasi kapital di negara-negara inti, tetapi menghambatnya di periferi sehingga melanggengkan struktur sistem dunia yang paling mendasar. Munculah ketidakadilan atau ketidaksetaraan yang sangat menganakemaskan negara inti dan menganaktirikan yang bukan inti, menguntungkan pemilik kapital dan merugikan buruh, menganakemaskan-elit nasional dan menganaktirikan kelas menengah dan kelas bawah. Ketidaksetaraan atau ketidakadilan tidak terlalu parah di negara-negara inti di mana buruh terorganisir dengan baik (seperti di negara-negara kesejahteraan di Eropa Barat dan Utara) tetapi sangat parah di tempat-tempat lain. Negara-negara tertentu boleh saja berdiri, berjaya, atau runtuh, tetapi struktur stratifikasi pasar umumnya tetap kukuh, dan tendensi inheren ekonomi dunia kapitalis adalah meningkatkan ketidakadilan.

2 . Globalisasi dan Teknokapitalisme

Menurut Anthony Giddens, globalisasi sebagai sebuah proses sosial yang ditandai dengan semakin intensifnya hubungan sosial yang mengglobal. Kehidupan sosial di satu wilayah akan berpengaruh pada kehidupan manusia di wilayah lain, dan begitu sebaliknya. Jika sepakat dengan Anthony Giddens ketika ia bicara dalam bukunya *Modernity and Self Identity* (1991), modernitas melakukan detradisionalisasi yang diciptakan oleh globalisasi. Mengikuti pandangan Giddens, modernitas adalah sebuah gerakan perubahan di segala bidang yang pada intinya mengklaim perlunya efisiensi dan serba praktis atas nama peningkatan kualitas hidup manusia yang menggunakan logika positivistik. Dalam pandangan positivistik, perkembangan

masyarakat bergerak secara linier, dimulai dari masyarakat primitif, tradisional, dan modern. Konsekuensi atas obsesi berkembang menjadi masyarakat modern, maka asumsi utamanya adalah bahwa primitivitas dan tradisionalisme adalah penghambat masyarakat modern. Karena itu jika pilihannya menjadi masyarakat moderen, maka harus diikuti oleh detradisionalisasi.

Menurut Anthony Giddens, globalisasi sebagai sebuah proses sosial ditandai dengan semakin intensifnya hubungan sosial yang mengglobal. Kehidupan sosial di satu wilayah akan berpengaruh pada kehidupan manusia di wilayah lain. Pada kenyataannya, yang mengalami globalisasi adalah nilai-nilai modernitas yang berekspansi ke wilayah-wilayah tradisional, terutama ke daerah pedesaan dan pinggiran. Oleh karena itu modernitas sebagai sebuah gerakan yang mengglobal terus melakukan tekanan pada tradisionalisme.

Sementara itu, Douglas Kellner mempunyai perhatian terhadap fenomena globalisasi yang dilihatnya dari perspektif kritis dan neo-Marxian. Ia berargumen bahwa kunci untuk memahami globalisasi adalah dengan meneorikannya sekaligus sebagai produk revolusi teknologi dan restrukturisasi global atas kapitalisme. Namun, perubahan itu terkait erat dengan faktor-faktor politik dan sosial, karena itu ia menganjurkan agar melihat globalisasi dari perspektif dialektik antara teknologi, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Perspektif dialektik juga menjelaskan bahwa terdapat ciri-ciri progresif dan emansipatoris globalisasi dan bahwa orang harus berbicara tentang keduanya. Faktor pemisah utama, sekali lagi dengan perspektif dialektik adalah perbedaan antara globalisasi yang dipaksakan dari atas dengan

yang tumbuh dari bawah. Yang kedua ini adalah akibat dari kontestasi dan rekonfigurasi hal-hal yang diterapkan pada tingkat masyarakat yang lebih rendah. Demokrasi bisa berasal dari bawah, dan pada taraf global hal ini bertentangan dengan kekuatan otoriter dari atas (Kellner, 2002, dalam Ritzer, 2004: 636).

Sementara itu Ulrich Beck membedakan tiga konsep utama, yaitu globalisme, globalitas, dan globalisasi. Globalisme adalah pandangan bahwa dunia ini didominasi oleh ekonomi dan bahwa kita tengah menyaksikan munculnya hegemoni pasar dunia kapitalis dan ideologi neoliberal yang mendukungnya. Bagi Beck, hal itu melibatkan pemikiran mono kausal dan linier. Multidimensionalitas perkembangan global seperti ekologi, politik, kebudayaan, dan masyarakat sipil secara tidak tepat direduksi menjadi satu dimensi ekonomi tunggal. Kendati mengkritik globalisme, Beck melihat adanya sejumlah nilai lebih dalam gagasan globalitas, di mana ruang-ruang tertutup, khususnya yang diasosiasikan dengan bangsa, semakin menjadi ilusi. Mereka menjadi ilusi karena globalisasi, atau proses ketika negara-negara bangsa yang berdaulat dikotak-kotakan dan digerogeti oleh aktor-aktor transnasional dengan beragam prospek kekuasaan, orientasi, identitas, dan jaringan. Proses transnasional itu bukan hanya bersifat ekonomis, tetapi juga melibatkan masalah ekologi, kebudayaan, batas-batas negara, dan masyarakat sipil. Proses transnasional itu melewati batas-batas bangsa, mendorongnya untuk terus meluber, walaupun tidak menjadi sesuatu yang tak relevan. Globalitas berarti bahwa mulai dari sekarang, tidak ada lagi kejadian-kejadian di atas planet bumi ini

yang akan jadi kejadian lokal semata (Beck, 2000: 11).

3. Teori Ruang

Sejak era 1970-an, telah muncul banyak minat dalam teori sosial dan teori kultural sehubungan dengan persoalan ruang dan tempat. Sebelumnya, teori modern lebih tertarik kepada waktu, dengan melihatnya sebagai lapangan dinamis perubahan sosial, sedangkan tempat dipandang sebagai sesuatu yang mati, mapan dan tidak bergerak, yang dilalui oleh gerak sejarah. Sebagaimana kata Foucault, *'seluruh sejarah tetap tertulis ke dalam ruang-ruang yang pada saat yang sama akan menjadi sejarah kekuasaan, keduanya bersifat plural-mulai dari strategi-strategi besar geopolitik sampai taktik sederhana suatu habitat'* (Foucault, dikutip oleh Soja, 1995b:14, dalam Barker, 2000: 307). Sebagaimana dikatakan Giddens (1984), pemahaman tentang bagaimana aktivitas manusia didistribusikan dalam ruang adalah satu hal mendasar dalam analisis kehidupan sosial. Interaksi manusia terjadi pada ruang tertentu yang mengandung berbagai makna sosial. Sebagai contoh, 'rumah' dibagi ke dalam ruang-ruang hunian-ruang depan, dapur, ruang makan, kamar tidur, dll yang

digunakan dengan berbagai cara dan tempat di mana kita melakukan berbagai aktivitas dengan makna sosial yang berbeda. Menurut argumen ini, kamar tidur adalah ruang intim di mana kita jarang mengundang orang asing, sementara ruang depan atau parlour dipandang sebagai tempat yang cocok

bagi pertemuan semacam itu. Selanjutnya Giddens (1984) menggunakan konsep Goffman (1969) tentang wilayah 'depan' dan 'belakang' untuk mengilustrasikan suatu divergensi mendasar aktivitas sosial-spasial. Ruang depan adalah tempat di mana kita memasukkan ke dalam pertunjukkan 'di atas panggung' publik segala aktivitas yang dibuat-buat, formal dan dapat diterima secara sosial. Wilayah belakang adalah ruang di mana kita berada 'di belakang layar', menyiapkan pertunjukkan bagi publik atau tempat dimana kita bisa santai atau tampil dengan perilaku dan tuturan tidak terlalu formal. Pembagian ruang secara sosial ke dalam kawasan depan dan belakang atau ke dalam pemakaian dapur, kamar tidur dan parlour secara benar tentu saja bersifat kultural. Kebudayaan yang berbeda mendesain rumah dengan cara yang berbeda, mengalokasikan pertentangan makna atau cara berperilaku yang sesuai. Dalam konteks dengan masalah studi ini, teori ruang yang juga sering dipakai dalam tradisi Cultural Studies, adalah yang berkaitan dengan ruang perkotaan. Dengan mengambil lokasi di kota Tenggarong yang digerakan oleh komoditas batubara, maka akan dilihat bagaimana ruang perkotaan menjadi arena dan tempat bagi kontestasi diantara para aktor yang terlibat dalam berebut 'emas hitam' atau batubara. Oleh karena itu akan digunakan karya Harvey (1973, 1985) dan Castells (1977, 1983) yang menekankan kepada strukturasi dan restrukturisasi ruang sebagai suatu lingkungan yang diciptakan melalui perluasan kapitalisme industri. Mereka berpendapat bahwa geografi kota bukan merupakan akibat dari 'kekuatan alamiah' melainkan kekuasaan kapitalisme dalam menciptakan pasar dan mengendalikan tenaga kerja. Komodifikasi dan

pencarian pasar baru yang didorong oleh korporasi kapitalis menjadikan mereka sensitif terhadap pertanyaan tentang lokasi keuntungan relatif yang mereka peroleh. Upah kerja yang lebih rendah, unionisasi yang lebih lemah dan konsesi pajak mengarahkan perusahaan untuk lebih memilih tempat-tempat tertentu ketimbang tempat lain sebagai lokasi perkebunan, pasar dan pembangunan. Mirip dengan itu, kebutuhan untuk menemukan bentuk investasi alternatif, dan kondisi khas pasar dan intervensi negara, membantu sejumlah sektor ekonomi (dan beberapa tempat) untuk mendapatkan preferensi (Barker, 2000:316).

Bagi Harvey, negara telah memainkan peran utama dalam reproduksi kapitalisme dan pembentukan lingkungan perkotaan. Sebagai contoh, ekspansi pasca perang warga suburban adalah akibat dari, paling tidak sebagian, pembebasan pajak yang diberikan kepada pemilik rumah dan perusahaan konstruksi, dijalankannya pengaturan pinjaman oleh bank/asosiasi pengembang, dan beroperasinya transportasi, telekomunikasi dan infrastruktur kesejahteraan yang diperlukan agar kawasan suburban bisa berkembang. Bagi Castells, rumah, sekolah, jasa transportasi, fasilitas hiburan dan pembagian kesejahteraan adalah suatu aspek dari 'konsumsi kolektif' yang melekat dalam kapitalisme dan penciptaan suatu lingkungan perkotaan yang kondusif bagi bisnis.

Kota dikatakan sebagai tempat perjuangan kelas yang ditimbulkan oleh kapitalisme dan ditandai oleh perseteruan atas kontrol ruang dan distribusi sumber daya. Ini meliputi konflik atas pemotongan pengeluaran untuk kesejahteraan selama masa restrukturisasi kapitalisme pada tahun 1980-an dan 1990-an. Memang, bagi Harvey dan Castells,

reorganisasi kota adalah suatu aspek dari restrukturisasi kapitalisme pada skala global, mengilustrasikan bahwa tempat kehidupan perkotaan tengah berada di atas jalan panjang ketergantungan dan eksploitasi yang membangun kapitalisme di seluruh penjuru dunia (Barker, 2000:316). Dengan penjelasan Harvey dan Castells tersebut kota Tenggarong tumbuh pesat karena kehadiran kaum kapitalis yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, khususnya batubara. Para kapitalis mencari wilayah baru dan memperluas usahanya dengan melakukan diversifikasi usaha, setelah menjadikan bisnis batubara sebagai bisnis utama. Para pemburu batubara ini kemudian meramaikan dan bahkan menjadi faktor penentu bagi berbagai sektor di Tenggarong. Berkelindan dengan kekuatan birokrasi dan politik lokal, maka perburuan batubara menjadikan Tenggarong benar-benar menjadi arena pertarungan dari berbagai kepentingan. Praktik kebudayaan kota pun mengalami dinamika luar biasa, dan tentu saja dalam pertarungan itu ada pihak yang dominan dan ada yang terpinggirkan.

4. Teori Marginalitas

Sementara itu untuk menjelaskan fenomena marginalitas penduduk lokal dalam kaitannya dengan globalisasi sebagai sebuah gerakan, bisa meminjam penjelasan dari teori ketergantungan. Dalam konteks global, hubungan pusat dan pinggiran ada yang mencoba mengkaji dari teori ketergantungan. Gunther Frank (1957) mengenalkan teori ketergantungan pada tahun 1967 dengan memanfaatkan tesis Paul Baran yang

menyatakan bahwa eksploitasi Dunia Ketiga tidak hanya makin meluas setelah berakhirnya era kolonial, tetapi juga menjadi makin “efektif.” Keterbelakangan merupakan akibat dari penghisapan ekonomi dari daerah tertinggal oleh kapitalisme metropolitan yang maju. Frank memberikan frase menarik untuk proses ini dengan istilah “pembangunan keterbelakangan”. Menurutny, pembangunan dan keterbelakangan bukan hanya relatif dan kuantitatif, tetapi juga “relasional dan kualitatif” karena “berbeda secara struktural.” Mekanisme kapitalis yang sama akan menghasilkan perkembangan atau kemajuan di pusat dan keterbelakangan di pinggiran (Frank, 1957). Konsep marjinal dalam konteks ini merujuk ke individu atau kelompok yang “terisolasi” atau tidak sesuai dengan masyarakat atau budaya yang dominan dan dianggap sebagai pinggiran dalam masyarakat atau unit sosial, termasuk kelompok minoritas dengan implikasi yang merugikan. Di sisi lain, marjinal dari sudut pandang administrasi dianggap penting karena di luar arus utama yang dekat dengan kekuasaan dan pusat kendali dibutuhkan dukungan kekuatan yang merujuk pada daerah pinggiran atau perbatasan.

Dalam beberapa dekade terakhir, kelompok politik kehilangan haknya untuk mengekspresikan perasaan mereka tentang tempat mereka dalam demokrasi, atau bahkan di ekonomi global. Beberapa individu dan kelompok menggunakan ide marjinalitas untuk menggambarkan kelompok yang dianggap berada di luar arus utama. Para ahli ilmu politik telah mengembangkan ide marjinalitas ini, dan konsep yang menyertainya tentang “pusat” dan “pinggiran”, untuk menciptakan cara-cara baru dalam mengerti atau memahami bahasa dan

kekuasaan. Penggunaan gagasan marjinalitas paling kontemporer melahirkan ide baru untuk menggabungkan gagasan kekuatan dominasi dengan spasial dengan membangun metafora “menjadi marjinal terkadang lebih dipilih untuk memiliki lebih sedikit daya dan menjadi agak jauh dari pusat kekuasaan”.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan observasi langsung ke lokasi yang menjadi subyek utama penelitian, yaitu masyarakat lokal di seputar pertambangan Batubara Kutai Kartanegara. Dalam usaha mengembangkan teori berdasarkan data lapangan, metode observasi partisipasi juga dilakukan. Studi lapangan ini terutama digunakan untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi obyektif dinamika masyarakat lokal di seputar lokasi pertambangan.

Disamping itu penelitian ini juga merupakan studi dokumentasi sehingga membimbing penelitian ini pada pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen dari segenap teks, yang berkaitan dengan proses marginalisasi penduduk lokal di sekitar pertambangan Batubara. Dengan kata lain, studi ini merupakan perpaduan antara kerja lapangan (field work) dan kerja pustaka dengan penggalian data skunder melalui pelacakan dari dokumen otentik. Kerja lapangan dimaksudkan untuk dapat mengeksplorasi dan memperoleh data primer (first hand informations) dan kerja pustaka dimaksudkan untuk mengkaji data sekunder (second hand informations). Penggunaan perpaduan antara data primer dan sekunder diharapkan akan dapat

menghasilkan akurasi analisis dan kedalaman interpretasi atas masalah tersebut.

D. Pembahasan

Tenggarong adalah sebuah panggung kontestasi perebutan batubara. Berbagai aktivitas politik dan ekonomi bahkan kultural adalah sebuah manifestasi kontestasi untuk meraih rejeki batubara. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam terutama minyak bumi dan gas alam (migas) serta batubara sehingga perekonomian Kutai Kartanegara masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai lebih dari 77%. Sektor pertanian dan kehutanan hanya memberikan kontribusi sekitar 11%, sedangkan sisanya disumbangkan dari sektor perdagangan dan hotel, yakni kurang lebih 3%, industri pengolahan sekitar 2,5%, bangunan 3%,

keuangan 1% dan sektor lainnya sekitar 2%. Tidak ada pembicaraan yang begitu antusias bagi warga masyarakat Tenggarong kecuali batubara. Hampir setiap orang, terlepas dari posisi sosialnya, semuanya berbicara soal batubara menurut tafsir, pemaknaan, dan kepentingan masing-masing. Di kalangan elite Tenggarong, batubara adalah komoditas tambang yang bagaimanapun harus dieksplorasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Para petinggi di jajaran birokrasi, menempatkan batubara sebagai barang strategis yang bernilai ekonomi tinggi oleh karena itu harus dikelola dan dikuasai. Segenap peraturan harus dibuat agar batubara dapat dieksplorasi, ditambang, dan dijual. Tidak penting bahwa apakah di masa mendatang akan membawa dampak atau risiko negatif bagi kehidupan bersama, yang penting

adalah bagaimana agar batubara dikuasai dan digali secara besar-besaran untuk kemudian dijual. Lebih dari itu, Pemkab Tenggarong memang secara sengaja mengundang para investor asing itu dengan sikap "pasrah", dalam arti menyerahkan sepenuhnya pada investor untuk melakukan sekehendak hatinya dalam menambang batubara. Tidak ada negosiasi kritis, apalagi semacam pengawasan terhadap beroperasinya para investor dalam menambang batubara, tidak peduli bahwa itu semua akan merusak lingkungan alam, termasuk dampak sosial-budayanya.

Cara berpikir yang berorientasi pada pertumbuhan merasuk pada jajaran birokrasi, sehingga pendapatan dari sektor pertambangan, khususnya batubara, harus dilipatgandakan. Batubara harus dijadikan sebagai sumber utama dalam pendapatan daerah, setelah kayu glondongan sudah habis dibabat. Akibat dari orientasi pertumbuhan, yang berarti terobsesi pelipatgandaan pendapatan, maka sejumlah aturan diproduksi agar eksplorasi besar-besaran terhadap batubara semakin terbuka dan lancar. Karena itu, kebijakan pemerintah Tenggarong sangat membuka terhadap hadirnya investor asing agar mengeksplorasi batubara. Maka sejumlah perusahaan asing berdatangan ikut menambang batubara dalam skala besar.

1. Aktor Kontestasi

Setidaknya terdapat beberapa aktor yang berhasil diidentifikasi dalam kontestasi memperebutkan batubara. Pertama adalah pemerintah baik pusat maupun kabupaten; investor baik asing maupun nasional; politisi dan Parpol, aparat keamanan, tokoh masyarakat, ormas, LSM, dan warga

masyarakat pada umumnya. Semuanya berusaha menunjukkan eksistensinya manakala berurusan dengan batubara, dan tentu saja di antara mereka saling berkontestasi berebut rejeki batubara, yang oleh masyarakat Kaltim populer diplesetkan kepanjangan dari Batu Tuhan Bagi Rata.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM, mengklaim mempunyai kewenangan utama dalam kepemilikan batubara, sehingga siapa pun yang ingin mengelola batubara harus berurusan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu hasil tambang batubara sebagian besar harus diambil pemerintah pusat. Sementara itu pemerintah daerah baik Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara juga menjadi kontestan perebutan batubara. Dengan mengklaim sebagai tanah wilayahnya, maka siapa pun yang ingin menambang batubara harus seizin pemerintah daerah. Meskipun sama-sama aktor dari kalangan pemerintah, diantara mereka juga berkontestasi. Misalnya persoalan retribusi batubara, hingga sekarang tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemkab Kukar masih terus terjadi. Pemkab Kukar merasa memiliki wilayah luas yang kaya kandungan batubara, tetapi kurang memberikan kontribusi signifikan terhadap APBD. Karena itu pernah Pemkab Kukar membuat Perda untuk memungut retribusi 50 cen US Dollar per tonnya, tetapi Perda ini ditolak oleh pemerintah pusat. Merasa sulit memungut dari Perda retribusi, maka Pemkab Kukar membuat Perda lain yang berpotensi untuk mendapatkan rejeki "emas hitam". Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Izin Pembuangan Limbah untuk Kegiatan Pertambangan Batubara, adalah sebuah produk perundangan yang pada praktiknya sangat membuka peluang Pemkab untuk menekan

perusahaan penambangan batu-bara. Pembuatan peraturan oleh Perda Pemkab Kukar juga merupakan cara untuk berebut kue batubara. Ketika berkontestasi dengan pemerintah pusat, mereka bertarung untuk mendapatkan redistribusi batubara. Sementara kontestasinya dengan para investor, dengan "senjata" Perda Pembuangan Limbah, adalah cara untuk mendapatkan bagian kue batubara dengan menekan para investor.

Memang harus diakui bahwa niat awal Pemkab Kukar menerbitkan berbagai produk hukum, seperti Perda dan SK Bupati misalnya, untuk mengatur tata kelola pertambangan batubara demi kepentingan kesejahteraan rakyat, dan sekaligus peduli pada pelestarian lingkungan hidup. Perda Pembuangan Limbah tersebut misalnya, jelas spirit utama produk hukum ini adalah demi menjaga pelestarian lingkungan hidup. Munculnya peraturan ini pun merupakan respons atas munculnya masalah ketidaktertiban dan ketidakpedulian perusahaan batubara terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi Perda semacam itu jika dicermati secara teliti merupakan modus elite pemerintah untuk berebut rejeki batubara. Ada celah yang digunakan untuk memeras para perusahaan sehingga menjadi pintu masuk untuk mengakses rejeki batubara. Jadi modusnya menjual pasal-pasal yang berisi sanksi atau ancaman kepada para investor, tetapi sekaligus membuka ruang untuk "negosiasi". Sudah menjadi rahasia umum jika makna negosiasi di sini adalah bersifat transaksional. Karena itu soal Amdal misalnya, akan dengan mudah menjadi ajang permainan negosiasi yang ujung-ujungnya adalah uang dengan prinsip tahu sama tahu.

Sudah menjadi rahasia umum pula jika kalangan birokrat pemerintahan jika berelasi dengan kaum

bisnis menjadikan segenap produk hukum sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan. Teks peraturan adalah memiliki kandungan kekuasaan, yaitu ketentuan sah untuk memaksa para pihak yang dikenai peraturan. Celah ini akan dimanfaatkan oleh segenap birokrat yang memiliki kekuasaan untuk menutup perusahaan atau ijin dicabut, atau juga setidaknya tidak diperpanjang, jika melanggar aturan yang sejak awal sulit dipenuhi. Jadi posisi perusahaan berada dalam posisi dependen ketika berhadapan dengan para birokrat. Di balik teks Perda itulah, para birokrat memainkan kekuasaan dengan motif laba.

Tidak pernah menyadari bahwa teks Perda adalah amanat rakyat, karena prosesnya melalui perdebatan di lembaga perwakilan rakyat. Jadi di sini mandat rakyat diselewengkan demi kepentingan bisnis. Yang mendapat untung adalah para penguasa, dan bukan rakyat biasa yang merupakan pemilik sah kekayaan alam. Ketika masih dalam proses pembuatan aturan, para penguasa mengatasnamakan rakyat dengan menerapkan politik representasi, tetapi setelah menjadi produk resmi, dimanfaatkan menjadi komoditas. Perda adalah sebuah teks yang syarat dengan muatan kekuasaan, dan sekaligus berpotensi menjadi sumber meraih keuntungan ekonomi. Karena itu Perda dalam konteks perebutan batubara, dengan mudah tergelincir pada proses komodifikasi produk hukum. Dengan kewenangan memberikan ijin, maka Pemkab akan dengan cerdas memanfaatkannya untuk menekan perusahaan. Tidak heran jika dalam proses membuat produk hukum memang sengaja membuat pasal yang keras dengan memberi sanksi berat, tetapi pada

implementasinya kemudian dilunakkan untuk memperoleh keuntungan penambangan batubara.

Aktor lain adalah para investor baik asing maupun dalam negeri yang sejak lama berkepentingan mengeksplorasi batubara di Kalimantan. Para investor asing, umumnya datang dari RRC, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Setidaknya hingga tahun 2010, pemerintah Kalimantan Timur telah memberi izin kepada 33 perusahaan asing dan nasional berskala besar mengeruk batubara. Pemerintah juga memberi 1.212 izin untuk Konsensi Pertambangan atau yang populer dengan singkatan KP bagi perusahaan tambang berskala kecil. Sepanjang tahun 2007-2008, Pemprov Kaltim telah mengeluarkan 247 izin penambangan. Setahun kemudian terdapat 687 izin KP yang dikeluarkan di salah satu distrik di Kaltim. Mereka itu saling bersaing menguasai 22,1 persen luas Provinsi Kaltim. Pada tahun berikutnya izin tambang di Kaltim membengkak menjadi 1.271 pengelola yang beroperasi di lahan seluas 4,4 juta hektar tambang. Izin seperti itu bertebaran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Majalah Loka, 24 Agustus, 2012). Di wilayah Kecamatan Samboja saja misalnya, terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi dengan kapasitas penuh. Antara lain adalah PT Lembuswana Perkasa Kutai Kartanegara; PT Mitra Alam Persada Kaltim; PT Berkat Borneo Coal; PT Internusa Samarinda; PT Energi Batu Hitam Muara Lawa Kaltim; PT Cipta Anugerah Sakti; PT Bara Kumala Sakti Group Samarinda; dan masih banyak lagi yang lainnya. Sejumlah perusahaan itu satu sama lain berkontestasi dalam berbagai bentuk, dan adakalanya mengalami gesekan kepentingan. Akan tetapi yang lebih sering tarik-menarik kepentingan adalah antara sejumlah perusahaan dengan segenap

elemen masyarakat yang juga merupakan aktor kontestasi perebutan batubara. Dengan kata lain, perusahaan batubara di Kukar terus bertarung dan berhadapan dengan sejumlah elemen masyarakat selama mereka memproduksi. Jadi eksistensi perusahaan penambang batubara itu sendiri sejak awal merupakan eksistensi kontestatif. Ia di mana pun, kapan pun, dan pada saat apa pun harus terus berkontestasi dengan sejumlah aktor lain yang ingin mengais rejeki penambangan batubara.

Ketika berhadapan dengan warga misalnya, perusahaan harus siap dengan sejumlah tuntutan warga yang semuanya bersifat transaksional. Sejak maraknya penambangan batubara denyut lalu-lintas di jalan menuju ke arah pelabuhan sangat padat dengan hilir-mudik truk dalam frekuensi tinggi. Sebagai ilustrasi misalnya di Kecamatan Samboja Kukar, sehari-hari dilewati ribuan truk pengangkut batubara menuju ke pelabuhan. Dampaknya warga merasa terganggu kebisingan dan tebaran debu yang berakibat pada kesehatan, sehingga masalah ini menimbulkan konflik antara pihak perusahaan dengan warga masyarakat. Menariknya adalah bahwa solusi yang ditawarkan bukan lagi menggunakan mekanisme kultural dengan mengedepankan musyawarah, tetapi berubah pada hubungan transaksional. Bersamaan dengan munculnya masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan penambangan batubara, berkembang peningkatan kesadaran ekonomi warga yang mengarah pada hubungan transaksional. Oleh karena itu warga pun “menjual” masalah gangguan yang ditimbulkan oleh perusahaan penambangan, sehingga muncul istilah “uang debu”, “uang bising”, dan uang-uang yang lain.

Sejumlah aktor lain pun kemudian bermunculan mengikuti pergeseran hubungan kultural menjadi hubungan transaksional tersebut. Tiba-tiba saja sejumlah organisasi massa, organisasi kepemudaan, dan organisasi adat pun bermunculan mengakumulasi daya tawar lokal, yaitu klaim warga “asli” dan “jumlah anggota banyak”. Sebagai ilustrasi, Gerakan Pemuda Asli Kalimantan Timur (GEPAK) misalnya, ormas kepemudaan ini tiba-tiba keberadaannya menjadi “menguat” ketika berelasi dengan perusahaan penambangan. Di Samboja terpampang papan nama besar di “kantor sekretariat”, yang meskipun kantor itu sendiri tidak ada aktivitas organisasional, dan bahkan gedungnya tidak ada kecuali bangunan kecil milik salah satu warga. Situasi itu juga dilakukan oleh sejumlah ormas lain sehingga perusahaan penambang harus memperhitungkannya. Karena sudah dapat diduga, munculnya kekuatan dan keberadaan laten menjadi manifes dari sejumlah ormas tersebut adalah kemunculan “dalam rangka”. Artinya, merupakan usaha penguatan eksistensi untuk meningkatkan daya tawar terhadap segenap perusahaan penambang batubara, yang pada akhirnya akan mendapatkan bagian rejeki batubara dalam bentuk “uang solusi”. Daripada terus mendapat gangguan dari sejumlah ormas, solusi paling mudah adalah uang, dan inilah pergeseran cepat ke arah hubungan serba transaksional.

Gangguan warga masyarakat sekitar pun sering terjadi dan kontestasi pun semakin sengit. Sebagai ilustrasi, pada saat sedang proses pengangkutan, sering kali truk mendapat kecelakaan di sekitar pemukiman warga. Bentuknya mulai dari menyerempet pejalan kaki, pengendara sepeda dan sepeda motor, atau menyerempet hewan piaraan.

Bahkan ada kalanya terjadi “kecelakaan”, dalam arti kecelakaan artifisial yang dilakukan oleh warga dengan melempar sepeda motor ke kolong truk pengangkut batubara yang sedang lewat. Kalau perlu sepeda motor yang tadinya rusak ringan, oleh warga sengaja di remuk sendiri, agar mendapat ganti rugi sepeda motor baru. Jika sudah terjadi kecelakaan, pihak perusahaan penambang harus membayar ganti rugi yang besarnya ditentukan secara sepihak oleh warga yang terorganisir. Ada juga yang meminta ganti rugi atas makam yang terkena lahan penambangan, dengan harga yang mahal. Ada warga yang kebetulan makam leluhurnya terkena penambangan batubara, minta ganti rugi 1 milyar per makam. Modus-modus semacam itu sering terjadi, yang motif utamanya adalah perolehan ganti rugi. Argumennya adalah imajinasi para warga, bahwa penambang batubara adalah pengeruk kekayaan dan banyak uang dan cara semacam itu adalah cara yang paling mudah bagi warga untuk memperoleh bagian dari pengurusan kekayaan sumber daya alam bumi Kalimantan.

Situasi kontestasi secara vulgar tersebut kemudian mendorong salah satu kelompok yang menawarkan gagasan koperasi untuk mengatasi konflik antara perusahaan dengan warga. Koperasi itu bernama Oasis yang menghimpun sejumlah armada pengangkut batubara untuk bernegosiasi dengan warga setempat jika terjadi kecelakaan. Jumlah anggota Koperasi Oasis mencapai 700 truk yang pemiliknya adalah warga perseorangan juga. Melalui koperasi ini disepakati adanya iuran rutin dari para pengangkut per unit truk satu kali tarikan angkutan, sebesar Rp 25.000. Dari jumlah itu Rp 22.000 sebagai jaminan jika terjadi kecelakaan,

sedangkan Rp 3.000 dibagikan ke warga melalui unit sosial RT. Tidak ada dasar hukum apa yang digunakan oleh Koperasi Oasis tersebut untuk mengutip jasa tersebut. Oleh karena itu jika dilihat dari aspek hukum formal, maka tindakan koperasi itu merupakan ilegal dan merupakan bentuk pemalakan terorganisir.

2. Negara Lemah

Dalam situasi kontestatif seperti itu, ironisnya negara tidak tampil cukup kuat dalam upaya menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara perusahaan penambangan batubara dengan warga. Konflik yang terjadi di kawasan jalan negara, seharusnya kepolisian tampil tegas menegakkan aturan dalam berlalu-lintas. Tetapi ketika berhadapan dengan ormas dan warga, seringkali justru bukan polisi yang meleraikan tetapi ormas-ormas tersebut dan di Kecamatan Samboja adalah Koperasi Oasis. Pemkab juga tidak berdaya dalam menghadapi situasi kontestatif dan konflikual di seputar eksplorasi batubara di Kukar. Bahkan Pemkab seringkali tampil lemah ketika terjadi konflik antar perusahaan akibat tumpang-tindihnya perizinan. Sebagai ilustrasi, dalam proses perijinan tambang batubara yang diberikan oleh Bupati/Walikota masih sering menimbulkan masalah, karena lokasi tambang yang sudah berijin oleh Pemkab/Pemkot diterbitkan ijin kembali oleh pemerintah setempat yang lokasinya sebagian atau keseluruhan sebenarnya sudah berijin. Masalah ini timbul biasanya lokasi penambangan batubara sudah berijin, tetapi belum ada aktivitas penambangan dan kemudian dijual kepada pihak lain. Jika sudah terjadi konflik antar pemilik ijin

seperti itu masing-masing perusahaan mengerahkan massa dan terjadi bentrokan.

Lebih dari itu, lemahnya negara dalam situasi kontestatif berebut batubara di Kukar, karena negara juga menjadi bagian dari usaha penambangan. Warga Kukar sudah mengetahui jika pemilik perusahaan penambangan batubara juga dari kalangan elit pemerintahan, petinggi kepolisian, dan petinggi TNI. Dengan kata lain, dibalik aktivitas eksplorasi batubara di bumi Kalimantan adalah para elit yang memiliki modal kekuasaan dan modal ekonomi kuat. Di luar praktik politik perijinan dan jual jasa keamanan terhadap perusahaan, para elit di Kukar juga sejak awal sudah bermain dalam bisnis batubara. Bahkan sejak proses mencari kekuasaan melalui Pilkada misalnya, sudah ditengarai untuk mendapatkan konsesi batubara. Muncul tesis, terdapat hubungan signifikan antara peningkatan ijin penambangan batubara dengan mendekatnya waktu menjelang Pilkada. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa para tim sukses dari setiap calon bupati akan mendapatkan konsesi perijinan penambangan batubara. Sementara itu, aparat keamanan dan pertahanan juga menjadi bagian dari perebutan mengais rejeki batubara ini. Mekanismenya tampak pada relasinya dengan perusahaan dan kekuatan terorganisir warga baik ormas maupun LSM dan organisasi adat. Di tengah situasi konflikual itu, aparat kepolisian juga mendapatkan peluang untuk kebagian rejeki batubara. Sedangkan aparat TNI di darat juga ikut mengamankan dan memberi garansi keamanan pada perusahaan, termasuk keamanan hingga ke laut. Ada semacam jasa pengawalan terhadap kapal-kapal pengangkut batu bara hingga ke zona "aman". Akan tetapi semua yang menggunakan simbol-

simbol negara, mengalami proses individualisasi tepat ketika berada pada titik perolehan imbalan uang. Artinya, ketika bernegosiasi menggunakan simbol-simbol negara atau mengklaim menjadi bagian struktur negara, tetapi begitu mendapat imbalan uang dari perusahaan batubara tidak masuk kas negara, namun dinikmati secara individual. Praktik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) seperti itu sudah lazim dalam proses kontestasi berebut emas hitam di bumi Kalimantan. Amdal pun juga tidak luput dari permainan kontestasi yang bermotif ekonomi politik. Melalui penggunaan legalitas aturan tentang lingkungan hidup entah berupa UU atau Perda, aparat birokrasi dan juga segenap ormas menghembuskan isu kerusakan lingkungan atas nama penegakkan Amdal. Perusahaan sering dituduh tidak mepedulikan masalah Amdal dan melanggar aturan. Pada kenyataannya memang demikian, sejumlah kawasan penambangan batubara meninggalkan bekas pengerukan sehingga bumi Kalimantan tampak terkoyak. Jika dilihat dari udara, tampak jelas sebagian besar wilayah Kalimantan Timur bekas-bekas eksplorasi penambangan sehingga bumi Kalimantan tampak bopeng-bopeng. Logikanya, jika isu Amdal dijadikan argumen untuk menegur perusahaan, kelestarian lingkungan tetap terjaga. Tetapi karena sejak awal isu itu memang untuk mendapatkan uang, maka meskipun perusahaan sudah mengeluarkan ganti rugi pada penuntut penegakkan Amdal, tetapi bumi Kalimantan tetap rusak. Uang ganti rugi itu tidak untuk memperbaiki lingkungan tetapi masuk kantong individu aparat birokrasi, aparat keamanan, juga ormas, dan bahkan LSM. Jadi isu Amdal juga

mengalami proses komodifikasi oleh sejumlah pencari rente.

3. Pemiskinan Warga

Pemerintah Provinsi Kaltim berniat membangun wilayahnya dengan sejumlah program jangka menengah dan jangka panjang. Tidak ada jalan lain untuk mewujudkan mimpinya, kecuali harus mengundang perusahaan tambang dengan harapan menciptakan lapangan kerja, mendongkrak PAD, meningkatkan akselerasi pembangunan, dan kemudian berusaha memperbaiki kerusakan alam yang ditimbulkan penambangan. Akan tetapi sebagaimana di daerah lain, pada kenyataannya niat baik itu justru menjadi mimpi buruk, terutama bagi warga penduduk sekitar tambang. Itu semua karena sekitar 70 persen ekstrak batubara yang menghasilkan 12,5 milyar ton hingga 2008 diekspor ke beberapa negara. Sementara penduduk sekitar pertambangan tetap saja miskin, tidak jauh berbeda kita belum ada eksplorasi batubara. Sebagai ilustrasi, dari sekitar 1.410 desa di Kaltim, ternyata baru 610 desa yang mendapatkan pasokan listrik, itu pun sering kali terjadi pemadaman listrik, atau populer dengan listrik byar pet.

Sebuah ironi di daerah kaya energi batubara, dan mereka ibarat ayam mati di lumbung padi. Sudah tentu ironi itu bersumber dari persoalan salah kelola oleh pemerintahnya, terutama faktor kultural yang hanya ingin cepat mencari untung dengan hanya menjual sumber daya alam. Memang Kabupaten Kukar terkenal sebagai daerah kaya, PAD-nya pun pernah mencapai 7 trilyun lebih, sebuah pencapaian luar biasa untuk ukuran setingkat kabupaten. Tidak heran jika di Kukar berdiri bangunan perkantoran

yang amat megah dan mewah, dan bahkan stadion berhasil dibangun dengan kapasitas penonton 60 ribu. Infrastruktur jalan di perkotaan lebar dan mulus, sementara fasilitas publik lain pun juga dibangun seperti fasilitas taman rekreasi yang berada di tengah delta sungah Mahakam. Kukar pun kemudian sering dipercaya untuk menyelenggarakan event berskala nasional, seperti Pekan Olahraga Nasional, MTQ Nasional, dan berbagai pertemuan tingkat tinggi. Semua itu karena daerah ini memiliki PAD yang sangat fantastis untuk ukuran kabupaten. Akan tetapi, di tengah gemerlap dan limpahan PAD itu, tingkat kemiskinan penduduk Kukar cukup tinggi. Mereka ini tampak di pemukiman di kawasan pinggir sungai Mahakam, pelabuhan, dan kawasan pedalaman yang kondisi perumahan dan fasilitas kesehatannya sangat memprihatinkan. Di pelabuhan Samboja misalnya, tampak nyata perbedaannya. Sebuah rumah penambang batubara berdiri megah di tengah pemukiman kumuh para nelayan yang jauh lebih banyak jumlahnya.

Mengapa di tengah eksplorasi besar-besaran penambangan batubara, penduduk sekitar kurang mendapat akses meraih keuntungan? Salah satu faktor penyebabnya antara lain karakter tambang batubara bersifat padat modal. Untuk menggali batubara di area hutan diperlukan peralatan berat seperti esvakator, bulldoser, dan alat transportasi berskala besar. Di samping memerlukan modal besar, karakter seperti itu kurang menyerap tenaga kerja yang berasal dari penduduk setempat. Untuk mengoperasikan sejumlah peralatan utama pertambangan batubara diperlukan latar belakang pendidikan memadai, dan skill tinggi. Oleh karena penduduk sekitar kurang memiliki sumber daya

manusia memadai, maka sulit terserap pada sektor pertambangan batubara kecuali beberapa jenis pekerjaan yang mengandalkan otot, seperti buruh angkut dan tenaga keamanan yang daya serapnya sedikit. Akibatnya penduduk sekitar kurang terangkat kesejahteraannya, dan tetap berada dalam kondisi miskin.

Situasi semacam itu membuat penduduk sekitar praktis hanya menjadi penonton di tengah hiruk-pikuk pengurusan energi batubara. Mereka berada dalam deru mesin alat berat dan lalu-lalang angkutan mulai dari truk hingga kapal besar yang membawa batubara bernilai milyaran dan bahkan trilyunan rupiah. Mereka begitu akrab dengan situasi gairah dan semaraknya penambangan batubara, tetapi secara struktural terhalang pembatas yang tidak memungkinkan mengakses rejeki batubara secara lebih beradab. Hanya mengandalkan rasa memiliki wilayah dan kemudian menggertak perusahaan secara kolektif dalam bentuk unjuk rasa pada momen tertentu yang merugikan warga. Hanya dari aktivitas itulah mereka dapat mendapatkan rejeki batubara, dan bukan melalui cara-cara yang lebih beradab seperti bekerja di sektor pertambangan yang mengandalkan skill dan pengetahuan memadai.

4. Resistensi Warga

Di tengah antusiasme mengeksplorasi batubara yang aktor utamanya adalah para pengusaha, pemerintah, dan aparat keamanan, terjadi proses peminggiran dan bahkan pemiskinan warga sekitar. Hanya para aktor yang potensial yang dapat mendapatkan rejeki dalam kontestasi perebutan batubara. Sementara para warga kebanyakan

kurang mendapatkan peluang untuk meraup rejeki batubara, akibat keterbatasan SDM dan batas-batas struktural buatan para elit yang berkolaborasi dengan kekuatan kapital. Respons atas keadaan seperti itu, meskipun dalam bentuknya yang vulgar mendapat perlawanan atau resistensi dari para warga. Bentuk resistensi itu antara lain melakukan penghadangan pada sejumlah truk yang mengangkut batubara, protes atas pencemaran lingkungan, adanya banjir, dan kebisingan. Sejumlah warga pernah melakukan blokade jalan karena penambangan dianggap menyebabkan banjir yang merusak pemukiman. Protes itu menuntut ganti rugi kerusakan, dan setelah melalui negosiasi, akhirnya pihak perusahaan mengganti masing-masing kepala keluarga Rp 2.000.000.

Ada juga bentuk resistensi berupa penolakan terhadap penambangan, dan harus dihentikan karena tidak membawa kesejahteraan warga sekitar. Protes semacam ini biasanya dilakukan warga atas pendampingan LSM. Akan tetapi sebegitu jauh protes keras ini tidak mendapat tanggapan serius dari perusahaan, karena kaum kapitalis mendapat dukungan dari kalangan birokrat dan aparat keamanan. Lebih dari itu, perekonomian Kaltim, dan khususnya Kukar sudah sangat tergantung pada sektor pertambangan. Oleh karena itu sejumlah protes warga terhadap penambangan batubara sering mengalami kegagalan, dan sebagai kompensasinya adalah membayar dalam bentuk uang. Ironisnya cara semacam itu berjalan efektif, dan perlawanan warga semakin lemah gaungnya. Akan tetapi dalam pengertian sesungguhnya, perlawanan warga di sekitar penambangan, terutama penduduk asli, praktis tidak ada karena memang kurang memiliki kesadaran bahwa mereka

terpinggirkan oleh kehadiran aktivitas penambangan batubara. Sejumlah LSM berusaha menyadarkan mereka akan keterpinggirannya, namun kurang berhasil, dan bahkan beberapa LSM melakukan politik representasi. Artinya, tidak sedikit yang melakukan advokasi atas nama warga penduduk sekitar, akan tetapi pada akhirnya hanya demi kepentingan mereka sendiri, dan bahkan demi ikut meraih rejeki batubara. Sementara itu Pemkab Kukar juga sering melakukan politik representasi dengan membuat sejumlah peraturan seperti SK Bupati atau Perda. Dalam setiap konsideran dan tujuan produk hukum itu senantiasa melindungi dan demi upaya kesejahteraan warga sekitar penambangan, namun pada praksisnya tidak demikian. Bahkan produk hukum itu sendiri digunakan sebagai instrumen birokrat untuk mengais rejeki batubara.

E. Penutup

Begitulah, serba-serbi dan dinamika kontestasi perebutan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejumlah aktor bermain dalam panggung kontestasi yang semuanya bermuara pada usaha bagaimana memperoleh bagian rejeki emas hitam tersebut. Batubara pun diplesetkan menjadi Barang Tuhan Bagi Rata, dan siapapun tergerak untuk ramai-ramai berebut hasil penambangan batubara. Meskipun demikian, jika dicermati distribusi rejeki batubara, baik langsung maupun tidak langsung, tidak merata. Terutama bagi warga sekitar penambangan, kurang mendapatkan akses hasil batubara akibat kendala struktural maupun kultural. Situasi ini menimbulkan ironi di tengah gelimang kekayaan alam batubara yang depositnya

milyaran ton, akan tetapi di Kukar masih banyak warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Karena itu batubara pun dari sudut pandang kritis, sebenarnya lebih merupakan akronim Batu Tuan tak Dibagi Rata, yang lebih menikmati adalah kaum kapitalis dan segenap kompradornya.

Akan tetapi di tengah kenyataan seperti itu, negara tampil lemah, tidak mampu menjadikan batubara menjadi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Undang Undang Dasar 1945. Salah satu sebabnya adalah karena negara menjadi bagian dari kontestasi memperebutkan rejeki batubara. Negara, dalam hal ini Pemkab Kukar mengalami individualisasi dan personalisasi, sehingga sejumlah produk negara dalam bentuk Perda atau pun ketentuan resmi digunakan sebagai instrumen efektif dalam meraih keuntungan pribadi. Perda pun mengalami komodifikasi ketika birokrasi berelasi dengan kalangan kapitalis batubara. Birokrasi tidak berupaya mengefektifkan tata kelola eksplorasi batubara dengan prinsip demi kepentingan publik, tetapi mengubahnya demi kepentingan segelintir elit birokrat, politisi, aparat keamanan, melalui pemeliharaan hubungan transaksional. Bersamaan dengan itu aparat keamanan pun ikut bermain dalam panggung kontestasi perebutan rejeki batubara dengan "menjual" jasa keamanan. Namun ironisnya, ketika muncul kekuatan milisi dari sejumlah warga yang juga menjual jasa keamanan, aparat keamanan negara juga tidak berdaya, karena juga menjadi bagian dari mekanisme itu melalui prinsip tahu sama tahu atau populer dengan singkatan TST. Akibatnya aparat keamanan negara tidak mampu menegakan hukum karena determinisme

keuntungan ekonomi. Sejumlah petinggi Kepolisian dan TNI pun ikut berbisnis batubara.

Di tengah hiruk-pikuk kontestasi perebutan penambangan batubara di bumi Kalimantan, denyut perekonomian Kukar dan Kaltim pada umumnya memang terasa menguat. Akan tetapi ironisnya, di tengah gelimang uang batubara, warga masyarakat sekitar masih banyak yang miskin. Lebih dari itu, apa pun yang terjadi dalam aktivitas penambangan, tetapi satu hal yang jelas bahwa kerusakan alam tak terhindarkan. Bumi Kalimantan terkoyak, terkelupas, dan merana di tengah ambisi dan mesin hasrat kapitalisme yang tak terpuaskan.

Wallerstein, I. (1990) "Culture as the Ideological Battleground of the Modern World-System" *Theory, Culture Society* 7:31-25.

Wallerstein, I. (2003) *The Decline of American Power*. New York: New Press.

Wallerstein, I. (2004) *World-System Analysis: An Introduction*. Durham, NC: Duke University Press.

Daftar Pustaka

- Beck, Ulrich, 2000, *What Is Globalization?* Cambridge, England: Polity Press.
- Boli, J., dan Lechner F.J. (2009) "Teori Globalisasi". Dalam Bryne S. Turner (eds). *The New Blackwell Companion to Social Theory*. Malden: Blackwell Publishing Ltd.
- Bouman, P.J. 1982. *Sosiologi Fundamental*. Bandung: Djambatan
- Frank, Gunder. 1957. *The Political Economy of Growth*. New York: Pinguins Book.
- Giddens, Anthony, 1991, *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Stanford California: Stanford University Press.
- Kellner, Douglas, 2002, "Theorizing Globalization", *Sociological Theory* 20: 285-305.
- Lechner, F.J., Boli,J. (2005) *World Culture: Origins and Consequences*. Oxford: Oxford University Blackwell.
- Maleong, Je. Lexy, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman, 2004, *Sociological Theory*, New York: McGraw-Hill.
- Robertson, R., 1992, *Globalization*, London and Nesbury Park, CA:Sage.
- Spivak, Gayatri. 1988. "Can the Subaltern Speak?" *Marxism and the Interpretation of Culture*: 271-313.